



Akuntabilitas Organisasi Mahasiswa Akuntansi

Novrys Suhardianto dan Hendriyat Surgandhi

Universitas Airlangga

novrys@feb.unair.ac.id

doi:10.18382/jraam.v1i3.56

Informasi Artikel

Tanggal masuk	01-02-2016
Tanggal revisi	26-03-2016
Tanggal diterima	27-03-2016

Keywords:

Accountability,
Nonprofit Organization,
Accounting Student,
Education

Abstract

The aim of this research is to respond towards the issues about accountability practices in the Himpunan Mahasiswa Akuntansi (HMA) as an Accounting Students Association and the rationale behind carrying out the practice of its accountability mechanism. The subject of this research are the HMA's members as well as the stakeholders. The object of this research is accountability practice held by the HMA in the period of 2012-2014. A series of data is collected through documentation and indepth interview to managers and faculty members. The results of the analysis show that the HMA holds its accountability in order to meet the terms specified by the officials which is above the HMA itself, such the faculty and university. For the management and members of the HMA, a concrete manifestation of behaviour and actions is a form of accountability. They assume that all forms of activities and the use of funds in the HMA conducted based on good faith and good behaviours, although sometime they use fake evidences to record the transactions.

Kata kunci:

Akuntabilitas,
Organisasi Nirlaba,
Mahasiswa Akuntansi,
Pendidikan

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab isu praktik akuntabilitas di organisasi Himpunan Mahasiswa Akuntansi (HMA) dan alasan di balik praktik akuntabilitasnya. Subyek penelitian adalah anggota dan pemangku kepentingan HMA sedangkan obyek penelitian adalah praktik akuntabilitas HMA selama 2012-2014. Data diperoleh melalui dokumentasi dan wawancara terhadap pengurus HMA dan para dosen. Hasil analisis menunjukkan bahwa HMA menyelenggarakan akuntabilitas untuk memenuhi persyaratan lembaga di atas HMA, yaitu fakultas dan universitas. Bagi pengurus dan anggota HMA, manifestasi nyata berupa perilaku dan tindakan adalah bentuk dari akuntabilitas. Asumsi mereka adalah bentuk aktivitas dan penggunaan dana dilakukan berdasar kepercayaan dan sikap yang baik meskipun terkadang mereka menggunakan bukti palsu untuk mencatat transaksi.

1. Pendahuluan

Menghadapi potensi persaingan pada lingkup ASEAN, para pendidik sebaiknya mulai mengevaluasi hasil proses pendidikan akuntansi yang diberikan kepada mahasiswa. Mahasiswa adalah salah satu pelaku dalam rangkaian pembelajaran di perguruan tinggi.

Perguruan tinggi bertindak sebagai fasilitator bagi mahasiswa dalam membentuk diri mahasiswa menjadi pemimpin masa depan. Mahasiswa akuntansi diharapkan dapat mengaktualisasikan kemampuan akuntansi yang diperolehnya di perkuliahan melalui aktivitas kesehariannya, termasuk berorganisasi. Kemahiran pe-

nerapan akuntansi dalam berorganisasi dapat menjadi salah satu alat evaluasi keberhasilan pendidikan akuntansi di perguruan tinggi.

Di universitas, organisasi mahasiswa berperan sebagai sarana dalam meningkatkan kemampuan akademis dan non-akademis, mengelola informasi antar mahasiswa, serta sebagai sarana penjalih hubungan kekeluargaan antar mahasiswa. Himpunan Mahasiswa Akuntansi Universitas Airlangga (HMA UNAIR) adalah salah satu organisasi mahasiswa yang berkedudukan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga (FEB UNAIR) yang merupakan wadah bagi mahasiswa jurusan akuntansi Universitas Airlangga dalam berorganisasi dan mengembangkan diri.

Sebagaimana organisasi lain, keperluan pendanaan bagi HMA adalah suatu hal yang mutlak. HMA sebagai organisasi nonprofit memperoleh dana dari donatur yang terdiri dari pihak fakultas/universitas, *sponsorship*, serta dari mahasiswa akuntansi UNAIR sendiri. Sepanjang tahun, dana ini digunakan untuk mengembangkan dan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan kemahasiswaan yang diadakan dalam bentuk agenda dan program kerja.

Sebagai organisasi mahasiswa akuntansi yang sedang belajar banyak soal akuntabilitas, HMA idealnya menjadi salah satu yang terdepan dalam penyelenggaraan praktik akuntabilitas yang baik. HMA memiliki praktik pelaporan keuangan yang relatif lebih maju dibandingkan dengan praktik pelaporan keuangan pada organisasi mahasiswa lain di Universitas Airlangga sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 1.

Gray et al. (2006) mengutarakan bahwa berkembangnya organisasi nonprofit menimbulkan suatu tantangan baru dalam studi ilmu akuntansi terutama dalam menentukan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang akuntabilitas dan kebijakan yang ada pada organisasi tersebut. Opini Gray et al. (2006) tersebut memunculkan skeptisisme pada praktik pelaporan yang dilakukan oleh HMA. Sementara organisasi mahasiswa lain melakukan pelaporan yang “minimalis”, HMA justru membuat pelaporan yang relatif lebih maju.

Penelitian ini berusaha mengungkap hal-hal yang mendasari HMA dalam melakukan praktik akuntabilitas. Penting pula untuk mengetahui praktik pelaporan yang dilakukan oleh organisasi mahasiswa sebagai wujud pertanggungjawaban organisasi yang dikelola dan diperuntukkan bagi sebaik-baiknya kepentingan mahasiswa di dalam universitas. Dengan demikian, tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui bagaimana praktik akuntabilitas yang

diselenggarakan oleh HMA UNAIR; dan

2. Mengetahui latarbelakang HMA UNAIR dalam melaksanakan praktik akuntabilitas.

Penelitian ini berkontribusi untuk mengevaluasi keberhasilan pendidikan akuntansi dalam menyiapkan calon akuntan (pemimpin) masa depan melalui praktik akuntansi di organisasi mahasiswa. Lebih lanjut, penelitian ini berusaha menunjukkan pentingnya mengintegrasikan kegiatan intrakurikuler dengan ekstrakurikuler untuk mencapai tujuan pembelajaran dan standar lulusan yang ditetapkan perguruan tinggi. Selain itu, penelitian ini berusaha mengonfirmasi teori pelayanan yang mengasumsikan bahwa para pengurus HMA menunjukkan praktik akuntabilitas karena dimotivasi oleh aktualisasi diri (Huse, 2007).

Kajian Teori

2.1. Akuntabilitas

Makna akuntabilitas berasal dari disiplin ilmu akuntansi (Bovens, 2007). Secara terminologis, akuntabilitas berasal dari bahasa latin “*accountare*” yang berarti mempertanggungjawabkan. Akuntabilitas atau “*accountability*” disusun dari dua kata, yakni “*account*” (catatan, rekening, atau laporan) serta “*ability*” (kemampuan). Akuntabilitas merupakan pengungkapan dan penyediaan informasi mengenai:

1. Tanggung jawab atas kebijakan, keputusan, tindakan, produk, dan transaksi; dan
2. Kewajiban untuk melapor dan menyediakan jawaban terkait dampak dan konsekuensi. Akuntabilitas merupakan sebuah konsep evaluasi di mana organisasi mempertanggungjawabkan kinerja, keadaan, atau isu-isu dalam masa kini maupun masa lampau.

Hal ini senada dengan Pasal 7 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 yang menjelaskan bahwa “Asas Akuntabilitas” merupakan asas pertanggungjawaban atas hasil akhir dari kegiatan yang dilakukan oleh penyelenggara kepada rakyat atau masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi sesuai dengan perundang-undangan.

Menurut Jordan (2005), akuntabilitas digunakan dalam menjawab pertanyaan yang terkait dengan pelayanan apa, oleh siapa, milik siapa, kepada siapa, dan bagaimana pelayanan tersebut dilakukan. Rochman (2012) menyatakan bahwa akuntabilitas adalah sebuah konsep yang merupakan bagian dari aktivitas organisasi, agar organisasi responsif terhadap pihak atau kelompok yang dilayani. Konsep akuntabilitas juga berguna untuk memperkuat organisasi itu sendiri dan merupakan salah satu kunci untuk menjamin keber-

lanjutan organisasi (Rooney, 2012).

Silvia dan Ansar (2011) memberikan perbedaan antara dua istilah yang sering digunakan beriringan, yakni *responsibility* (responsibilitas) dan *accountability* (akuntabilitas). Menurutnya, responsibilitas merupakan otoritas yang diberikan oleh atasan kepada bawahan untuk melakukan kebijakan. Di sisi lain, akuntabilitas adalah perwujudan atas kewajiban yang diamanahkan untuk menyikapi dan mempertanggungjawabkan kegagalan atau keberhasilan sesuai tujuan organisasi.

2.2 Organisasi Mahasiswa Intrakampus sebagai Organisasi Nonprofit

Organisasi mahasiswa (ORMAWA) intrakampus merupakan organisasi yang mendukung pengembangan kepemudaan atau mahasiswa yang terdapat di perguruan tinggi. Maksud keberadaan ORMAWA seperti yang diatur dalam Pasal 5, Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 155/U/1998 tentang pedoman organisasi mahasiswa dalam perguruan tinggi yaitu:

1. Mengembangkan diri mahasiswa ke arah perluasan wawasan, peningkatan kecendekiawanan, serta peningkatan integritas kepribadian untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi;
2. Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional; dan
3. Mengembangkan diri mahasiswa untuk menanamkan sikap ilmiah, pemahaman tentang profesi, meningkatkan kerjasama, serta menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan.

Dalam hal pendanaan ORMAWA, Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 155/U/1998, BAB V, Pasal 10 menjelaskan bahwa pembiayaan ORMAWA dibebankan pada anggaran perguruan tinggi tempat ORMAWA tersebut berkedudukan dengan seijin pimpinan perguruan tinggi. Sebagai organisasi yang sehat, ORMAWA seharusnya menyajikan informasi pertanggungjawaban penggunaan dana yang diperoleh. Oleh karena itu, ORMAWA memerlukan suatu aturan atau perangkat yang mengatur kebutuhan akan penyediaan informasi dalam rangka meningkatkan fungsi program kerja (Greenberg, 2003).

Zainon (2003) menyatakan bahwa hukum juga mengatur organisasi yang diharuskan untuk mempertanggungjawabkan kegiatannya setidaknya pada ting-

kat minimum.

2.3 Arah Akuntabilitas pada Organisasi Nonprofit

Hubungan antarpihak yang berkepentingan di dalam organisasi nonprofit berbeda dengan hubungan antarpihak pada organisasi komersial. Gray (2006) mencatat beberapa konsep hubungan dalam perspektif pendonor–penerima pada organisasi nonprofit. Konsep hubungan yang umum ditemui pada organisasi nonprofit yakni:

1. Pihak pendonor dan pihak penerima dapat dibedakan secara cukup jelas. Keating dan Frumkin (2003) menyatakan bahwa pihak donor merupakan pelaku utama karena organisasi dapat berjalan dengan berkelanjutan berkat dukungan dan kontribusi mereka; dan
2. Organisasi nonprofit tidak dilihat dari perspektif untung/rugi seperti pada organisasi komersial. Dengan demikian, dimensi-dimensi lain dalam pertanggungjawaban seperti dimensi sosial dan lingkungan menjadi aspek yang dianggap penting bagi organisasi nonprofit.

Jordan (2005) mencatat bahwa setidaknya ada delapan golongan *stakeholders* yang dapat diidentifikasi dari hubungan yang dilakukan oleh organisasi nonprofit, dua diantaranya adalah pendonor dan pemerintah. Sedangkan enam golongan lainnya adalah publik, pengguna (*beneficiaries*), organisasi lain, komunitas pergerakan sosial, organisasi global serta swasta, dan pengurus dari organisasi nonprofit itu sendiri.

Sebagai organisasi nonprofit, himpunan mahasiswa seharusnya mengimplementasi PSAK 45 sebagai bentuk akuntabilitas kepada para donatur yang tidak mengharapkan pembayaran kembali atas sumber daya yang diserahkan selain sebagai sarana pembelajaran. Menurut Undang-undang Nomor 16 tahun 2001 pasal 48, organisasi nonprofit di Indonesia wajib menyajikan laporan kepada para pemangku kepentingan. Di sisi lain, pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK 45) memberikan panduan pelaporan keuangan organisasi nonprofit. Lebih dari itu, karakteristik organisasi nirlaba yang disyaratkan oleh PSAK 45 bisa ditemukan dalam himpunan mahasiswa antara lain:

1. Memiliki sumber daya dari donatur yang tidak mengharapkan pembayaran kembali;
2. Menghasilkan barang/jasa tanpa bertujuan memupuk laba; dan
3. Tidak ada kepemilikan yang bisa dialihkan sebagaimana entitas bisnis.

Ebrahim (2003) menjelaskan konstruk akuntabilitas organisasi nonprofit menjadi 5 dimensi, yaitu:

1. Laporan. Dengan adanya pelaporan, organisasi dapat menyediakan data yang tertulis dan dapat diakses oleh mereka yang membutuhkan;
2. Evaluasi dan penilaian kinerja. Evaluasi dan penilaian kinerja bermanfaat untuk memberikan pandangan dan pertimbangan yang membangun dari sudut pandang pihak eksternal maupun internal;
3. Partisipasi. Partisipasi memberikan akuntabilitas kepada pihak-pihak yang berkepentingan di bawah organisasi, yakni klien, penerima manfaat, dan anggota organisasi;
4. Regulasi diri sendiri. Regulasi diri sendiri pada organisasi nonprofit membentuk standar atau pedoman terhadap kinerja atau sikap-sikap mereka dalam hal akuntabilitas ke dalam organisasi itu sendiri; dan
5. Audit sosial. Audit sosial adalah suatu proses yang kompleks yang merupakan integrasi atas elemen-elemen dari mekanisme akuntabilitas yang lain (laporan, penilaian kinerja, partisipasi, dan regulasi diri sendiri). Model yang digunakan dalam pelaksanaan audit sosial secara umum adalah (1) dialog dengan *stakeholders* dan pengutaraan persepsi, komentar, dan pandangan oleh para pemangku kepentingan kepada organisasi; (2) penerapan akuntansi sistemis, dan (3) *benchmarking*.

2.4 Teori Pelayanan (*Stewardship Theory*)

Teori Pelayanan atau *Stewardship Theory* adalah teori yang menyebutkan bahwa manajer serta pihak eksekutif dimotivasi oleh keinginan untuk melakukan pekerjaan dengan tidak berharap keuntungan dan untuk menjadi pelayan yang baik bagi organisasi. Mengingat ketiadaan keuntungan yang menjadi motif umum manajemen dalam bertindak, timbul pertanyaan mengenai bagaimana manajemen menghasilkan kinerja yang efektif bagi organisasi nonprofit (Donaldson, 1991).

Teori *Stewardship* menyatakan bahwa manajer didefinisikan lebih mementingkan keinginan prinsipal dan tidak mempunyai kepentingan pribadi. Di dalam teori pelayanan, manajer akan bertindak sesuai kepentingan bersama. Apabila kepentingan *steward* (pelayan) dan pemilik berbeda, maka *steward* cenderung akan berupaya bekerja sama daripada menentang. Sebuah asumsi yang penting pada teori pelayanan adalah bahwa manajer akan melakukan tujuan dan aktivitas sesuai dengan apa yang menjadi tujuan pemilik (Van Puyvelde et al., 2012).

Pada teori pelayanan terdapat tingkat pemilihan antara perilaku propribadi (*self serving*) dan pro-orga-

nisasional. Karakter pro-organisasional dibentuk dari perilaku propribadi yang saling menguatkan di dalam organisasi hingga sampai pada tingkat kolektif (Anton, 2010).

Orang-orang yang berada dalam kebersamaan cenderung mengembangkan budaya hubungan pelayanan daripada orang-orang berbudaya individual. Teori pelayanan berbeda dengan teori agensi yang memisahkan fungsi di antara manajer dan pemilik. Teori pelayanan berfokus pada konsekuensi yang menguntungkan apabila fungsi manajer dan pemilik dijabat oleh orang yang sama. Tidak seperti teori agensi dimana insentif diberikan kepada manajer dan pemilik dalam bentuk gaji maupun dividen, teori pelayanan berfokus pada dedikasi manajer untuk melakukan kebijakan dan aksi secara otonomi (Donaldson, 1991).

3. Metode Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode studi kasus karena dianggap merupakan strategi yang cocok dengan pertanyaan “bagaimana praktik dan apa latar belakang akuntabilitas pada pelaporan keuangan HMA UNAIR kepada para *stakeholders*?” dan fokus penelitian terletak pada fenomena dalam konteks kehidupan nyata.

Pertanyaan penelitian memberikan kerangka penting bagi strategi penelitian. Yin (2009: 8-9) mencatat bahwa dalam studi kasus, rancangan pertanyaan yang paling tepat adalah untuk jenis pertanyaan “apa”, “bagaimana”, “mengapa”, dan “siapa”. Rumusan Yin (2009: 8-9) tersebut selaras dengan tujuan penelitian ini.

Subjek penelitian ini adalah para anggota serta pemangku kepentingan dari HMA UNAIR yang terdiri dari Departemen Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, pengurus HMA, dan para anggota. Obyek penelitian adalah praktik dan latar belakang akuntabilitas pada pelaporan keuangan yang diselenggarakan oleh HMA UNAIR pada periode 2012-2014.

Struktur kepengurusan dalam HMA dapat berbeda secara signifikan di masing-masing periodenya. Peneliti melakukan penelitian pada dua periode kepengurusan organisasi sehingga peneliti dapat melihat aktivitas organisasi secara lebih utuh dan mendapatkan gambaran serta kondisi di lapangan secara menyeluruh.

4. Hasil dan Pembahasan

Bagian ini akan menjelaskan praktik akuntabilitas HMA berdasar dimensi akuntabilitas yang dijelaskan oleh Ebrahim (2003) yang terdiri dari lima

aspek yaitu pelaporan, evaluasi dan kinerja, partisipasi, regulasi diri sendiri, dan audit sosial. Selanjutnya, bagian ini akan menggali lebih dalam nilai-nilai yang melatar belakangi praktik akuntabilitas HMA.

Sesuai Bab IV Pasal 6 pada Anggaran Dasar (2008), HMA berorientasi pada pengembangan keprofesionalitas, intelektualitas, serta moralitas berdasarkan nilai-nilai yang menjadi tujuan organisasi. Untuk menjalankan program kerjanya, HMA mendapatkan dana dari Departemen Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB), sponsor, maupun peserta kegiatan.

4.1 Gambaran Umum Pelaporan HMA UNAIR

HMA UNAIR mempunyai struktur organisasi yang mampu mencerminkan semangat akuntabilitasnya. Gambar berikut menampilkan struktur organisasi HMA yang dilengkapi dengan komite audit maupun Badan Pengawas yang akan berkoordinasi dengan Ketua HMA. Ketua HMA harus bertanggung jawab kepada Musyawarah Mahasiswa. Atas penggunaan dana yang diterima dari Departemen Akuntansi maupun FEB, Ketua HMA juga harus bertanggung jawab atas penggunaan dana tersebut.

HMA UNAIR memiliki instrumen pelaporan berupa media tertulis yang dibuat bagi *stakeholders*. Kandungan informasi dari setiap media pelaporan dirangkum dalam Tabel 2. Media penyampaian informasi yang diberikan HMA adalah:

1. Proposal kegiatan
2. Proposal sponsorship
3. Laporan pertanggungjawaban setiap kegiatan
4. Laporan pertanggungjawaban tahunan

Dalam setiap media yang dipublikasikan, beberapa informasi ditampilkan kepada publik antara lain:

1. Informasi keuangan
2. Informasi struktur organisasi
3. Informasi program
4. Informasi lain-lain termasuk penghargaan kepada para pendukung, prosedur kerjasama, dan sebagainya.

a. Aksesibilitas Pelaporan

Mahasiswa yang ingin mengakses laporan HMA dapat mengaksesnya dengan bebas dari dalam lemari pada ruang sekretariat HMA. Apabila mahasiswa mau, mereka dapat meminjam laporan tersebut dengan seizin Kahima atau sekretaris.

“Kalau dari saya sendiri, menurut saya mudah sih sebenarnya. Aksesnya mudah dicapai.” (Rendy – Ketua Komite Audit 2013)

Selama ini, HMA hanya menyediakan akses laporan pertanggungjawaban dari lemari penyimpanan, bukan mempublikasikan LPJ tersebut ke publik. Beberapa anggota HMA bahkan mengaku tidak tahu di mana tempat penyimpanan laporan tersebut. Beberapa dari mereka juga tidak pernah melihat laporan tertulis HMA secara langsung.

“Tidak tahu. Mungkin (laporan HMA) di blognya ada, saya juga tidak tahu.” (Owik – Anggota HMA)

Kendati demikian, laporan HMA baik yang merupakan laporan kegiatan maupun laporan tahunan diserahkan kepada Departemen Akuntansi sebagai Pembina sekaligus pendonor HMA. Hal ini tercermin dari pernyataan Ketua Departemen Akuntansi:

“Sebagian ada yang periodik, setelah kegiatan selesai, dilaporkan ke Departemen Akuntansi, ada pula yang berbentuk laporan kegiatan bersama, setelah satu tahun periode kepengurusan.” (Agus Widodo – Ketua Departemen Akuntansi)

Panitia kegiatan akan melampirkan bukti-bukti pengeluaran pada laporan pertanggungjawaban. Pelampiran ini dilakukan dalam rangka membuat laporan pertanggungjawaban yang reliabel. Sebelum LPJ disampaikan kepada pihak-pihak yang berwenang, Komite Audit akan memeriksa kelengkapan bukti-bukti ini. Namun, dalam beberapa hal, Komite Audit memberikan kebijakan yang cukup permisif terkait dengan pelampiran bukti-bukti dalam laporan. Seperti pada kutipan wawancara berikut;

“Kita memberikan ketentuan misalnya nanti jumlah antara bukti struk, kwitansi, atau sebagainya tidak sama dengan realisasi kita memberikan apa.... dispensasi, kita akan memberikan kwitansi tambahan. Ini hanya hal yang urgent saja, tidak semua proker kita berikan kwitansi tambahan. Kwitansi ini agar nanti realisasi dengan anggaran itu sama.” (Rendy – Ketua Komite Audit 2013)

b. Penerapan PSAK 45 pada Laporan Keuangan HMA UNAIR

Penerapan PSAK 45 pada laporan keuangan HMA juga menimbulkan kesulitan-kesulitan. Salah satunya adalah identifikasi atas aset-aset yang menjadi

milik HMA. Penerapan PSAK 45 pada laporan keuangan HMA justru menimbulkan pertanyaan mengenai reliabilitas angka-angka pada laporan keuangan itu sendiri. Hal yang cukup aneh mengingat pada tiap transaksinya, baik panitia kegiatan maupun para pengurus tidak pernah membuat pembukuan atau jurnal transaksi. HMA juga tidak memiliki buku besar atau buku pembantu apapun (kecuali catatan-catatan pribadi yang dikelola oleh sekretaris secara pribadi pula). Dengan demikian, angka-angka yang tercantum dalam laporan keuangan tahunan HMA dianggap merupakan hasil murni dari perkiraan-perkiraan semata.

“....setelah saya lihat laporannya itu kebanyakan kalau misalnya kita memberikan penilaian berdasarkan harga perolehan, itu harga perolehannya itu benar-bener diestimasi dan full kiro-kiro, bahasa jawnnya.” (Rendy – Ketua Komite Audit 2013)

Bisa jadi, praktik seperti itu dilakukan oleh pengurus karena mereka beranggapan bahwa laporan harus dibuat dengan PSAK 45 sebagaimana laporan-laporan HMA yang terdahulu. Hal tersebut nampaknya sejalan dengan apa yang dikemukakan Silvia dan Ansar (2011) bahwa suatu praktik pelaporan, pencatatan, dan pengevaluasian dapat terjadi akibat pengaruh dari pemimpin sebelumnya atau budaya turun-temurun.

Ketua Departemen Akuntansi mengatakan bahwa HMA tidak harus membuat laporan keuangan dengan bentuk PSAK 45. Menurut beliau, PSAK 45 sebenarnya merupakan kebutuhan internal yang harusnya dilaksanakan HMA kepada *stakeholders* utamanya, yakni para mahasiswa. Akan tetapi, setelah diteliti, para mahasiswa tidak sepenuhnya paham tentang PSAK 45. Bahkan, dari informan-informan yang diwawancarai oleh peneliti, hampir semuanya tidak mengetahui bahwa laporan keuangan HMA dibuat dengan PSAK 45:

“Jujur sama sekali nggak ngerti (PSAK 45). Tidak tahu.” (Owik – Anggota HMA)

Di satu sisi, pengurus membuat pelaporan dengan sistematika PSAK 45 yang harusnya ditujukan untuk kepentingan anggota dan para mahasiswa. Akan tetapi, para mahasiswa tidak memberikan respon yang baik dalam laporan tersebut.

Selain itu, Departemen Akuntansi yang merupakan Pembina sekaligus pendonor HMA juga tidak

meminta laporan keuangan HMA yang disusun berdasarkan PSAK 45 setiap periode. Departemen menyarankan agar laporan tersebut dilaporkan kepada anggota HMA yaitu mahasiswa akuntansi secara umum.

“Ya sebenarnya tidak harus seperti itu (membuat laporan dengan PSAK 45). Tidak harus” (Agus Widodo – Ketua Departemen Akuntansi)
“... nah bukti-bukti itu nanti disusun pada saat pertanggungjawabannya dengan PSAK 45 dan itu yang harus dipertanggungjawabkan kepada mahasiswa sendiri. HMA kepada BEM.” (Agus Widodo – Ketua Departemen Akuntansi)

c. Antusiasme Stakeholders terhadap Pelaporan HMA UNAIR

Para pengurus HMA beranggapan bahwa animo anggota terhadap pelaporan HMA masih kurang, sebagaimana dikatakan dalam petikan wawancara berikut;

“...animo (untuk melihat laporan pertanggungjawaban) dari mahasiswa sendiri, saya rasa sih kurang. Bahkan di SI akuntansi.” (Rendy – Ketua Komite Audit 2013)

Kahima berpendapat bahwa anggota HMA lebih peduli terhadap keberhasilan atau kesuksesan suatu kegiatan, bukan pada informasi-informasi yang dilaporkan atas pelaksanaan kegiatan.

“Nah, kayanya anak-anak kurang begitu peduli (dengan pelaporan HMA), yang penting buat mereka yaitu acaranya berjalan lancar. Nah yang mereka pedulikan ya cuma itu, biasanya cuma acaranya itu sukses atau tidak, cuma begitu biasanya. Untuk keuangan biasanya kaya pihak-pihak fakultas gitu yang butuh.” (Raka – Kahima)

Pendapat atau hasil ini tidak jauh bertentangan dengan penelitian Fikri (2010) yang menegaskan bahwa masyarakat atau *beneficiaries* dari suatu organisasi tidak memberi perhatian yang demikian besar pada pelaporan. Apa yang mereka pedulikan adalah akuntabilitas tindakan.

Dapat disimpulkan bahwa tuntutan dan animo anggota/*beneficiaries* HMA terhadap laporan pertanggungjawaban masih relatif rendah. Hal ini sejalan dengan yang dikatakan Ebrahim (2003) bahwa derajat tuntutan pertanggungjawaban organisasi nonprofit oleh *beneficiaries* lebih rendah dibandingkan oleh pe-

ndonor. Hasil ini juga tidak bertentangan dengan apa yang dilakukan oleh Goddard dan Assad (2006) dimana laporan keuangan hanya ditujukan kepada donatur.

d. Latar Belakang Pelaporan

Sebagai lembaga penyalur dana pemerintah, lembaga yang berkedudukan di atas HMA seperti fakultas dan departemen akuntansi tentu perlu melaporkan penggunaan-penggunaan dana pemerintah yang disalurkan kepada mereka. Atas alasan tersebut, HMA wajib membuat laporan pertanggungjawaban kepada departemen akuntansi apabila kegiatan HMA didanai oleh departemen akuntansi sebagai penyalur dana pemerintah sebagaimana ditegaskan oleh Ketua Departemen:

“Apabila kegiatan tersebut sebagian didanai oleh Departemen Akuntansi, maka harus ada laporan pertanggungjawaban kegiatan dari HMA ke Departemen Akuntansi” (Agus Widodo – Ketua Departemen Akuntansi

“Dari sisi departemen, itu lapornya ke negara, nah pertanggungjawaban mahasiswa itu kan nanti diserahkan ke bagian keuangan, nah nanti formatnya itu harus sesuai dengan aturan negara.” (Agus Widodo – Ketua Departemen Akuntansi)

Format khususnya itu keuangan, artinya kan setiap dokumen kan diserahkan ke bagian keuangan, nanti yang membuat laporan ke negara adalah Fakultas, bukan ormawa.” (Agus Widodo – Ketua Departemen Akuntansi)

Motif ini sejalan dengan pernyataan Fahrudin (2003) bahwa sebagian besar organisasi memberikan bentuk pertanggungjawaban kepada lembaga donor yang bekerjasama hanya sebagai syarat administrasi daripada atas dasar kesadaran dalam membangun akuntabilitas.

Bagi pengurus atau manajemen HMA sendiri, fungsi pelaporan yang utama adalah sebagai kunci untuk melaksanakan kegiatan. Laporan pertanggungjawaban kegiatan harus diselesaikan sebelum HMA dapat mengajukan proposal untuk kegiatan yang baru. HMA tidak akan memperoleh izin kegiatan dan akses pendanaan untuk kegiatan tersebut apabila proposal kegiatan tidak dibuat dan diserahkan kepada pihak-pihak yang berwenang.

Laporan-laporan yang dibuat oleh manajemen HMA kerap dimanfaatkan untuk memberi gambaran

dan petunjuk tentang cara melakukan suatu kegiatan. Panitia kegiatan akan memanfaatkan laporan-laporan dari kegiatan tahun lalu sebagai sarana belajar untuk melakukan kegiatan di tahun berjalan.

Manajemen HMA sendiri juga memanfaatkan laporan anggaran sebagai alat pengendalian dan pengawasan keuangan.

“Yang terpenting itu nanti anggaran dana di sana. Nah nanti biar kalau anggaran dana, anggaran dana kenapa saya bilang penting karena di sini nanti kita bisa ngelihat ee pengeluaran. Pengeluaran dari acara itu seberapa besar, dan jangan sampai nanti pengeluarannya itu, apa ya, ee, lebih besar daripada kemampuan kita.” (Ben – Ketua HMA 2011)

4.2 Gambaran Umum Evaluasi dan Penilaian Kinerja HMA UNAIR

Pengukuran dari konten kuantitatif dapat dilihat karena pada dasarnya konten kuantitatif dari evaluasi dan penilaian kinerja merupakan penilaian atas *output* berupa “produk” yang dapat dilihat dan diamati (Ebrahim, 2003). Beberapa elemen yang dapat diukur dan diamati dituangkan oleh HMA di dalam indikator keberhasilan.

Setelah kegiatan selesai, indikator keberhasilan digunakan oleh HMA sebagai acuan dalam melakukan evaluasi kegiatan. Pada umumnya, indikator keberhasilan memuat hal-hal berikut ini:

1. Jumlah peserta
2. Waktu pelaksanaan kegiatan
3. Jumlah dana yang didapat dari pihak sponsor

Badan pengawas selaku evaluator HMA beranggapan bahwa pencapaian-pencapaian kualitatif lebih penting dari pencapaian kuantitatif.

“Kalau indikator yang hanya sebatas jumlah peserta, dan lain-lain, yang.. Menurut saya itu bukan yang indikator keberhasilan yang sesungguhnya, dalam artian yang.. Ketika kita mengikuti seminar. Hima mengadakan seminar untuk warga akuntansi. Jadi untuk lingkup anak akuntansi ada biasanya gitu. Tujuan di sana tentunya bukan jumlah orang yang datang berapa. Itu bukan tujuan utamanya. Tapi tujuan utamanya dari seminar itu adalah, dari sekian yang datang, siapa yang paham dan berapa banyak yang paham.” (Henry – Ketua BP HMA 2012)

Demikian juga dengan Raka yang menyatakan hal yang sama.

“Kalau menurutku pribadi, kualitatif, soalnya percuma kalau acara itu sukses tapi yang ngurusinya ya yang itu-itu saja.” (Raka – Ketua HMA 2013)

HMA belum memiliki kerangka pengukuran bagi konten kualitatif sehingga penilaian dan evaluasi terhadap konten kualitatif hanya berdasarkan dari citra diri, perasaan, atau pengalaman pribadi sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:

1. Ekspresi atau Perasaan

Pihak-pihak dalam HMA menggunakan ungkapan untuk mengekspresikan kesuksesan atas sesuatu, seperti ekspresi “luar biasa”:

“Tapi kalau acara sukses, bisa dikatakan oleh peserta, itu.. Eeee, menerima dengan hal yang luar biasa.” (Helmy - Kadiv Media dan Informasi 2011)

Juga ekspresi “senang”:

“Ya dari kualitatifnya dulu. Warga senang, pihak dekanat senang, departemen senang, dan semuanya berjalan dengan baik...” (Rendy – Ketua Komite Audit 2013)

Maupun perasaan “cocok” atau “pas”:

“Saya lihat dari tahun lalu kalau sudah pas atau belum atau perlu diperbaiki. Nah kan dulu saya juga stafnya. Saya sendiri itu merasa sudah pas.” (Raka – Ketua HMA 2013)

2. Perbandingan Masa Lampau dan Masa Kini

Pihak-pihak dalam HMA menggunakan perbandingan untuk menilai kondisi masa kini dengan kondisi masa lampau.

“Indikatornya juga bisa dilihat dari kegiatan, apakah kegiatan hima di periode yang sekarang itu lebih baik atau lebih buruk daripada yang tahun lalu.” (Ben – Ketua HMA 2011)

Juga pada nilai-nilai yang berubah pada suatu subjek atau objek yang dapat diamati atau dirasakan:

“Mungkin ya cuma dilihat anak ini sudah berani ngomong, sudah aktif, dan sebagainya. Itu biasanya yang menilai seperti itu adalah bidang PSDM, jadi mereka melihat bahwa, oh anak ini sudah berkembang, yang dulunya diem, sekarang jadi kaya gini.” (Raka – Ketua HMA 2013)

Elemen-elemen tersebut tidak ditulis dalam format yang dapat diukur intensitasnya, dan dengan demikian, evaluasi terhadap konten kualitatif hanyalah berupa pertukaran rasa dan pengalaman di antara pihak-pihak tertentu. Pertukaran rasa dan pengalaman cukup banyak dilakukan para pengurus maupun anggota di beberapa kesempatan, baik kesempatan formal maupun kesempatan informal.

Semua program kerja dan kegiatan HMA dirancang dengan pendekatan jangka panjang. Secara kuantitatif, suatu program dapat dikatakan berhasil apabila tingkat partisipasi peserta dalam program tersebut cukup tinggi.

“Tingkat partisipasi dari warga akuntansi unair terhadap, ee, kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh hima. Jadi kalau, eeh, semakin banyak, atau animo, animo mahasiswa akuntansi unair itu baik, nah saya rasa hima sudah berhasil.” (Ben – Ketua HMA 2011)

Juga ketika suatu program berjalan dengan tepat waktu, sesuai dengan apa yang direncanakan:

“Acara yang sukses itu menurut saya yang pertama ya bisa mengoordinir sesuai dengan rencana, terus tepat, kalau acara tepat waktu sih nggak masalah sih.” (Helmy – Kadiv Media dan Informasi 2011)

Hal lain yang dianggap sebagai kesuksesan sebuah program adalah suksesnya HMA membuat suatu kegiatan yang mendorong rasa kebersamaan, seperti yang diutarakan Saudara Rendy pada petikan wawancara berikut:

“...ya maksudnya kita membikin suatu acara kan ada feedbacknya, ada timbal baliknya. Yang paling penting ya kalau ada proker jangan sampai kalau, seperti kayak kalau ada butuhnya kita baru minta gitu lho, yang penting bisa membuat satu warga akuntansi ini bisa raket, bisa kebersamaannya ada gitu lho.”

(Rendy – Ketua Komite Audit 2013)

HMA dianggap sebagai tempat untuk belajar, oleh karena itu evaluasi dan penilaian kinerja dilakukan HMA salah satunya dalam rangka belajar berorganisasi dalam menyiapkan diri di dunia kerja. Pengurus yang lebih senior mengharapkan kontribusi staf-staf HMA untuk unjuk diri dalam aktivitas evaluasi dan penilaian kinerja. Evaluasi dan penilaian kinerja digunakan oleh manajemen HMA untuk mengendalikan organisasi. Apabila suatu program dianggap gagal, maka pengurus dapat membatasi atau menghilangkan kegiatan tersebut di kemudian hari.

Untuk itu, evaluasi dan penilaian kinerja perlu dilakukan oleh HMA secara baik dan berkesinambungan demi memiliki program yang jelas dan bermanfaat. Hal ini pada gilirannya akan meningkatkan akuntabilitas program apabila setiap program diiringi oleh efisiensi dan sikap profesional dalam pelayanan (Sujatmiko, 2006).

4.3 Gambaran Umum Partisipasi HMA UNAIR

Berbeda dari pelaporan dan evaluasi yang merupakan sebuah alat bagi organisasi untuk mencapai akuntabilitas, partisipasi merupakan sebuah proses untuk mewujudkan akuntabilitas. Bagian ini menguraikan partisipasi yang terjadi di HMA. Organisasi juga harus mengadakan proses pergantian pengurus atau regenerasi secara teratur (Fahrudin, 2003). Di dalam HMA, satu kepengurusan memiliki waktu minimum 10 bulan dan maksimum 14 bulan. Hal tersebut menyebabkan struktur organisasi HMA yang berubah secara signifikan dalam waktu yang tidak terlalu lama (kurang dari satu setengah tahun).

a. Musyawarah Mahasiswa

Berdasarkan anggaran dasar HMA, musyawarah mahasiswa atau Musma adalah perwujudan dari kedaulatan tertinggi berasal dari anggota HMA. Di dalam Musma, partisipasi dilakukan oleh peserta dengan metode tanya jawab. Pendapat atau pernyataan peserta tersebut dapat ditujukan untuk menggali informasi, menyampaikan kritik, atau memberikan saran ke depan bagi HMA.

Sayangnya antusiasme anggota HMA dan para pengurus pada musyawarah mahasiswa yang diadakan masih cukup minim. Peneliti melihat di tiap tahunnya, forum Musma ini tidak pernah dihadiri lebih dari 50 orang. Ini menunjukkan lemahnya komitmen dan keseriusan dari pihak-pihak di dalam HMA untuk menjadikan HMA lebih akuntabel. Karena dukungan dari

semua pihak dalam organisasi merupakan salah satu faktor penting dalam mewujudkan akuntabilitas (Rooney, 2012).

b. Aktivitas Sehari-hari

Partisipasi dari kalangan pengurus HMA tidak selalu dibarengi dengan penegakan terhadap perilaku-perilaku etis. Hal ini mengingat bahwa pada organisasi nonprofit, bentuk dukungan berupa partisipasi diberikan secara sukarela. Dalam HMA, apabila ada mahasiswa yang berstatus pengurus namun ia tidak berkontribusi dengan baik, maka tidak akan ada sanksi yang dikenakan atas mahasiswa tersebut.

Selama ini, seperti pada organisasi nonprofit yang bersifat *voluntary* seperti LSM, HMA juga berjalan dengan mengandalkan prinsip-prinsip itikad baik dari para pengurus maupun anggotanya, misalnya mengenai penggunaan dana.

“Mahasiswa kan temen-temen kita sendiri gitu lho. Ya wes nggak papa, yakin yakin, itu lho buat prokermu, nggak kamu makan sendiri”
(Farisa – Anggota HMA)

Tampaknya, ketiadaan sanksi ini merupakan salah satu hambatan aturan internal yang dialami oleh HMA. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Fahrudin (2003) bahwa banyak organisasi nonprofit yang belum memiliki aturan main internal.

c. Level Partisipasi pada HMA UNAIR

Salah satu bentuk akuntabilitas organisasi nonprofit adalah partisipasi. Partisipasi memberikan akuntabilitas kepada pihak-pihak yang berkepentingan di bawah organisasi, yakni klien, penerima manfaat (*beneficiaries*), dan anggota organisasi. Partisipasi juga dapat dijalankan jika pada saat tertentu pendonor ingin berinteraksi secara langsung dengan organisasi.

Peneliti melihat cukup banyak bentuk partisipasi di HMA yang ditentukan oleh organisasi. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, mekanisme rekrutmen merupakan hak prerogatif perekrut. Dalam hal ini, sang perekrut adalah orang yang telah ditentukan oleh pengurus dan kebanyakan dari para perekrut berasal dari kalangan pengurus sendiri. Adapun, perekrutan pengurus merupakan hak prerogatif Kahima berikut dengan penentuan bidang dan struktur organisasi.

Banyak kegiatan yang tidak didahului dengan pengumpulan opini publik. Meski panitia kegiatan seringkali menentukan sasaran atau teknis kegiatan tanpa didahului oleh pengumpulan opini publik atau ang-

gota, namun di sisi lain, anggota HMA dapat berpartisipasi sebagai panitia. Kutipan wawancara berikut menyatakan beberapa anggota yang bukan merupakan panitia kegiatan yang menanyakan sikap panitia dalam memutuskan biaya kegiatan.

“Biasanya negosiasinya, ini ga kelewat mahal? Soalnya kalau dilihat dari tahun kemarin, biayanya segede ini, sekarang kok gini, ha, di situ mungkin panitia bakal menjelaskan, oh iya mas, mungkin tahun kemarin nggak ada ini, sekarang ada tambahan ini, jadi lebih nambah biaya mas.” (Helmy – Kadiv Media dan Informasi 2011)

Calon peserta harus memenuhi prosedur yang ditetapkan oleh panitia apabila ingin mengikuti sebuah program atau kegiatan. Bahkan dalam beberapa kegiatan (seperti pada kegiatan ospek jurusan), peserta diwajibkan menghadiri kegiatan tersebut.

d. Latar Belakang Partisipasi HMA UNAIR

Bagian ini menjelaskan latar belakang praktik partisipasi HMA UNAIR sebagai bagian dari akuntabilitas organisasi nonprofit. Ikatan emosional anggota HMA menjadi pendorong utama partisipasi anggota untuk mendukung kegiatan HMA. Sebagai organisasi yang berlandaskan kekeluargaan, HMA mendambakan keakraban bagi semua anggotanya. Cita-cita tersebut menjadi semangat yang diusung oleh segenap pengurus HMA. Untuk mencapai cita-cita tersebut, pengurus HMA berusaha untuk terus mendorong para anggota agar tiap-tiap anggota dapat berpartisipasi aktif di dalam HMA.

HMA juga memiliki kegiatan-kegiatan yang menjadi identitas khas mereka. Dengan adanya kegiatan-kegiatan yang memiliki karakter atau ciri khas HMA, maka hal ini dapat mendorong partisipasi itu sendiri. Berbagai pihak dalam HMA rela untuk berkorban lebih demi kegiatan tahunan HMA.

“Yang acara tahunan dari akuntansi. Itu walaupun harga mahal tapi tetap pasti ikut” (Helmy – Kadiv Media dan Informasi 2011).

Yahya et al. (2005) mengatakan bahwa para pihak yang terlibat dalam organisasi nonprofit memiliki sebuah komitmen afektif yang didefinisikan sebagai kesediaan untuk melakukan upaya demi mencapai kesuksesan organisasi. Mahasiswa yang bergabung dengan HMA sebagai pengurus artinya ia bersedia untuk

mengorbankan pikiran, tenaga, dan waktunya untuk berpartisipasi di dalam HMA. Dalam mencapai kegiatan yang sukses, para panitia seringkali harus rela kehilangan waktu belajarnya, rela membagi waktu untuk merancang kegiatan di saat teman-teman mereka fokus menyelesaikan tugas, dan hal-hal lainnya.

4.4. Gambaran Umum Regulasi Diri Sendiri HMA UNAIR

Sebagai salah satu ormawa yang berkedudukan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNAIR, HMA melakukan suatu bentuk interaksi dengan ormawa lain di sekitarnya antara lain badan eksekutif mahasiswa (BEM) dan Unit Kegiatan Fakultas (UKF). BEM FEB beranggotakan mahasiswa yang merupakan gabungan mahasiswa seluruh jurusan di FEB UNAIR.

BEM FEB menerima laporan rutin dari UKF-UKF (termasuk HMA) dan bertindak sebagai pengawas di UKF-UKF tersebut. Selama ini BEM FEB berperan dalam mengoordinasikan ormawa di lingkungan FEB agar tiap-tiap ormawa tersebut dapat menyelenggarakan program kerjanya secara baik dan tertib. Selain itu, BEM FEB berfungsi dalam mengalokasikan dana yang disalurkan dari fakultas kepada UKF, termasuk HMA.

“Yang ngoordinasi biar nggak bentrok, terus yang mbagi uangnya itu di awal itu tanggung jawabnya BEM. Sing bagian budgetingnya itu lho, alokasi itu.” (Hilmy – Ketua BEM FEB 2013)

Departemen Akuntansi sebagai lembaga yang berkedudukan di atas HMA juga menyoroti pentingnya peran BEM FEB bagi HMA, terutama dalam pengawasan kegiatan.

“Yang mempunyai peran penting dalampengawasan kegiatan mahasiswa itu sebenarnya BEM, aturannya seperti itu.... Nah kalau sampai ada keterlambatan (laporan) itu sebetulnya yang harus menegur itu BEM dulu.” (Agus Widodo – Ketua Departemen Akuntansi)

Tidak banyak regulasi formal yang dibuat dan disepakati antara HMA dengan organisasi lain. HMA memiliki otonomi untuk mengatur dirinya sendiri. Sebaliknya, HMA juga tidak memiliki kapasitas untuk mengatur organisasi mahasiswa lain. Bahkan BEM FEB sebagai koordinator UKF di fakultas juga tidak memiliki kewenangan dalam mengatur HMA.

“Oh nggak bisa mas, kalau hima mengatur UKF, maupun BEM, BEM sendiri sebenarnya BEM nggak berhak untuk mengatur, hanya mengadvise saja, maksudnya ya jangan gitu.” (Hilmy – Ketua BEM FEB 2013)

Meski HMA secara horizontal tidak memiliki kewenangan untuk mengatur ormawa-ormawa lain, namun HMA harus mengomunikasikan aktivitas-aktivitas mereka kepada BEM FEB. Regulasi-regulasi yang ditetapkan BEM FEB kepada HMA dimaksudkan untuk mengatur HMA guna mewujudkan aktivitas organisasi yang tertib di lingkungan fakultas. Selain itu, BEM FEB juga berperan dalam mengatur pembagian dana yang diturunkan dari pihak fakultas.

4.5. Gambaran Umum Audit Sosial HMA UNAIR

Audit sosial menawarkan alasan-alasan mengapa sebuah organisasi nonprofit mengadopsi suatu mekanisme akuntabilitas. Pertama, audit sosial menawarkan keunggulan manajemen internal dalam memonitor kinerja organisasi. Audit sosial merupakan bantuan bagi organisasi untuk mengukur keberhasilan dan tujuannya (Zadek, 2004). Kedua, sebagai mekanisme akuntabilitas, audit sosial memberi perhatian pada para pemangku kepentingan dalam mengembangkan atau memperbaiki nilai-nilai di dalam organisasi. Audit sosial akan meminimalisasi konflik dengan membuat aktivitas organisasi menjadi lebih jelas dan terbuka. Ketiga, audit sosial berfungsi sebagai instrumen perencanaan dan pembelajaran strategis. Keempat, audit sosial akan memberikan cara bagi organisasi dalam meningkatkan reputasi publik mereka berdasarkan bukti yang diverifikasi secara eksternal (Zadek, 2004).

Sebagai organisasi nonprofit, HMA menjalankan aktivitasnya dengan dimonitor oleh beberapa pihak, diantaranya anggota, lembaga di atas HMA, dan pengurus HMA itu sendiri. Monitoring atau pengawasan dari pihak-pihak tersebut diharapkan dapat mendorong HMA dalam memenuhi akuntabilitasnya.

a. Dialog dan Pengutaraan Persepsi oleh Stakeholders

Selama ini, HMA dapat dikatakan cukup terbuka dalam menerima kritik dan saran oleh para *stakeholders*. Setiap anggota, pihak universitas, maupun para pengurus dapat langsung menyampaikan kritik, saran, dan pemikiran-pemikiran mereka kapanpun dan dimanapun. Dialog antara HMA dengan para *stakeholders* dapat terjadi dengan mudah dan cukup sering berkat kedekatan diantara mahasiswa itu sendiri. Ke-

dekatan di antara mereka menyebabkan penyampaian dapat dilakukan secara nyaman dan terbuka. Keterbukaan dari semua pihak ini penting untuk meningkatkan akuntabilitas (Rooney, 2012). Bahkan, kritik dan saran telah menjelma menjadi bahasan atau bahan obrolan mahasiswa sehari-hari.

“Jadi memang harus cocok dan pas. Nah karena kecocokan itu makanya untuk pertama kali dia harus terbuka. Terbuka, saat sudah terbuka, apa yang dia mau, apa yang dia minta, jadi kita enak.” (Helmy – Kadiv Media dan Informasi 2011)

Di sisi lain, pimpinan FEB UNAIR tidak ingin terlalu mengendalikan arah program HMA dan menerapkan hubungan *partnership* dengan organisasi mahasiswa. Hal ini dinyatakan oleh Wakil Dekan I.

“Peran saya itu tidak sebagai, apa, tadi itu, pengawas. Tapi sebagai partner. Kan kita bersama-sama mengembangkan organisasi mahasiswa yang ada ini untuk menghasilkan orang-orang yang mempunyai keahlian softskill yang bagus.” (Rudi Purwono – Wakil Dekan I)

Kendati demikian, pengendalian yang cukup ketat diterapkan pada sisi permintaan dana maupun pertanggungjawaban keuangan sebagaimana dituturkan Wakil Dekan II:

“Ini saya minta biasanya. Saya bulan maret harus sudah terima (permohonan dana). Kalau tidak terima saya tidak akan mengeluarkan sepeser uang pun.” (Indrianawati – Wakil Dekan II). Kepengurusan saya di wadek dua (penyerapan anggaran di akhir periode kepengurusan) itu nggak bisa. Jelek toh berarti. Ini sudah nggak, jadi sejak 2011 itu saya sudah, sejak si Heri, sebelumnya si heri, siapa, si Fuad. Fuad ya, Fuad itu pembelajaran. Heri udah lancar. (Indrianawati – Wakil Dekan II)

Dengan demikian, dialog dengan para pemangku kepentingan dilakukan oleh HMA. Sebagian dialog bersifat diskusi yang kolegial, misal dengan anggota dan Wakil Dekan I. Untuk pengelolaan keuangan dialog didominasi oleh lembaga donor (fakultas), misal dari Wakil Dekan II.

b. Perbandingan (*Benchmarking*)

Benchmarking berguna dalam mengukur perkembangan yang dilakukan oleh HMA terhadap organisasi lain. Perbandingan dapat dilihat dari dua pendekatan, yakni antara HMA dengan organisasi lain, atau HMA – seiring dengan berjalannya waktu – yaitu HMA di masa kini dan masa lalu. *Stakeholders* maupun pengurus seringkali melihat dan membandingkan HMA secara kronologis untuk melihat kemajuan-kemajuan yang dicapai.

“Indikatornya juga bisa dilihat dari kegiatan, apakah kegiatan hima di periode yang sekarang itu lebih baik atau lebih buruk daripada yang tahun lalu.” (Ben – Ketua HMA 2011)

Fokus pengamatan di HMA seringkali terbagi-bagi dalam tiap periode atau tiap masa jabatan. Seringkali *stakeholders* membandingkan kinerja atau kebijakan-kebijakan di HMA yang dulu dan sekarang sebagaimana tersirat dalam kutipan berikut;

“Nah untuk tahun ini, maksudnya tahun setelah era si Ben berakhir...” (Helmy – Kadiv Media dan Informasi 2011)

4.6. Nilai Akuntabilitas HMA UNAIR

a. Nilai Pembelajaran

Sebagai organisasi yang beranggotakan dan dikelola oleh mahasiswa, HMA dimaknai sebagai organisasi yang diperuntukkan sebagai wadah pembelajaran. Dengan bergabung dalam HMA, para pengurus memiliki cita-cita untuk menjadi lebih baik dari sebelumnya, baik dari tataran *soft skill* maupun *hard skill* mereka. Motivasi belajar yang tumbuh dalam diri pengurus dan anggota HMA juga membawa dampak dalam sikap dan kemampuan mahasiswa akuntansi UNAIR. Hal ini terlihat dalam prestasi-prestasi yang diraih oleh mahasiswa dan manfaat yang dirasakan oleh beberapa orang pengurus.

Peneliti melihat bahwa konsep akuntabilitas pada HMA sebagai organisasi mahasiswa lebih dari sekedar “nilai” yang tercetak pada laporan keuangan sebagaimana yang secara umum terdapat pada filosofi akuntansi. Namun, akuntabilitas pada HMA lebih kepada “nilai” secara rohani yang diwujudkan melalui keikhlasan dan harapan untuk berkembang menjadi manusia yang tumbuh dan lebih baik dalam melakukan tindakan serta memberikan sesuatu.

Keberadaan organisasi ini yang letaknya di da-

lam lingkungan kampus juga mendukung terciptanya susana pembelajaran. Tidak bisa dipungkiri bahwa mahasiswa sangat erat kaitannya dengan peran dan keseharian mereka sebagai kaum penuntut ilmu. Karena itu, HMA dipandang sebagai wadah untuk mempersiapkan diri dalam rangka memperoleh bekal untuk menghadapi tingkat kehidupan selanjutnya, yakni dunia kerja.

Bagi Rochman (2012), keinginan untuk belajar ini penting bagi akuntabilitas suatu organisasi. Kejujuran dan niat bersama untuk lebih baik dari tahun ke tahun akan bermanfaat bagi organisasi dan seluruh elemen yang ada di dalamnya untuk berproses secara reflektif untuk menjadi lebih baik. Di dalam upayanya untuk menjadi manusia yang tumbuh dan menjadi lebih baik, terdapat beberapa catatan mengenai budaya-budaya HMA sebagai organisasi pembelajar yang perlu dicermati. Diantaranya adalah budaya organisasi yang cukup permisif terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pengurus. Selama ini, atas nama “pembelajaran”, baik penegakan peraturan maupun pemberian sanksi dalam HMA dikenal cukup longgar. Kadang hal ini dipandang sebagai sesuatu yang menghalangi profesionalitas. Contohnya, peneliti kerap menemui aturan-aturan yang dilanggar oleh pengurus, namun tidak ada sanksi yang dikenakan bagi pengurus tersebut.

b. Nilai Kekeluargaan

Nilai kekeluargaan tercermin dari harapan-harapan anggota untuk menumbuhkan kebersamaan di antara mahasiswa akuntansi. Banyak dari mereka yang mengharapkan acara yang dapat merangkul semua anggota. Lingkungan di HMA yang juga satu lokasi dengan kegiatan perkuliahan bagi mahasiswa juga mendukung terciptanya rasa kekeluargaan. Para pengurus maupun anggota HMA tetap berinteraksi meskipun berada di luar kegiatan organisasi maupun tanpa adanya koordinasi khusus.

Dengan adanya semangat kekeluargaan yang tinggi, hal ini menjadikan para anggota dan pengurus sebagai *stakeholders* membaaur antara satu dengan yang lain dan tidak terdapat determinasi pemisahan yang jauh diantara mereka. Dengan begitu, rasa kebersamaan dan kekeluargaan ini memberikan dampak yang luas bagi mereka. Diantaranya adalah rasa nyaman dalam berinteraksi. Rasa nyaman tersebut pada gilirannya akan mendorong *stakeholders* untuk bersikap terbuka. Sikap terbuka diyakini sebagai sikap yang positif yang pada akhirnya dapat memberi pengaruh kemajuan bagi HMA.

Pengamalan nilai-nilai kekeluargaan di dalam HMA bukan tanpa hambatan. Peneliti masih menemukan beberapa situasi-situasi di lapangan yang perlu ditingkatkan untuk menyikapi masalah-masalah yang berkaitan dengan koordinasi antar pengurus dan anggota. Misalnya anggota HMA yang tidak dilibatkan dalam proses penyusunan, pembuatan, dan implementasi program sehingga beberapa anggota masih enggan untuk melakukan partisipasi karena belum merasa dilibatkan secara penuh dalam aktivitas-aktivitas di HMA.

Dengan demikian, penting bagi HMA untuk menanamkan konsep “milik bersama” dalam rangka mewujudkan akuntabilitas yang tinggi di antara pengurus maupun anggota. Legitimasi organisasi non-profit, sebagaimana legitimasi HMA terletak pada seluruh mahasiswa S1 Akuntansi yang merupakan konstituennya, maka sudah semestinya HMA mengembalikan dan mendorong *public trust* dan partisipasi bagi mahasiswa.

c. Nilai Birokrasi

Dalam melaksanakan beberapa aktivitasnya, HMA tidak lepas dari syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk memastikan organisasi tetap berjalan. Sebagai organisasi mahasiswa intrakampus, HMA tidak bisa berjalan sendiri tanpa adanya pengakuan atas keabsahan atau otorisasi dari pihak lain, yakni lembaga-lembaga di atas HMA. Seringkali HMA diharuskan untuk membuat proposal atau laporan pertanggungjawaban untuk memenuhi kebutuhan birokrasi. HMA harus mengikuti “aturan main” yang ditetapkan untuk menjamin kelangsungan aktivitas dan kegiatan yang diselenggarakannya.

Pendanaan bagi organisasi adalah hal yang mutlak harus ada. Tanpa pendanaan, organisasi tidak akan berjalan. Untuk memenuhi kebutuhan pendanaan, HMA harus membuat proposal kegiatan. Tanpa adanya proposal kegiatan yang dibuat dan diserahkan, dana tidak akan disalurkan oleh pendonor, dalam hal ini adalah pihak fakultas. Proposal kegiatan juga digunakan oleh HMA sebagai kunci melakukan sebuah kegiatan. Proposal kegiatan HMA digunakan sebagai perizinan yang ditandatangani oleh lembaga-lembaga di atas HMA, dalam hal ini adalah pihak departemen.

4.7 Implikasi Penelitian

a. Pembelajaran Sebagai Jiwa Organisasi

Nilai pembelajaran merupakan nilai yang dipegang oleh pengurus HMA dan para anggota. Nilai

inilah yang menjadikan semangat bagi mahasiswa untuk senantiasa mendorong diri mereka sendiri guna menjadi pribadi yang lebih baik.

Persaingan dan globalisasi yang semakin gencar membuat tenaga-tenaga profesional di Indonesia, termasuk para akuntan perlu untuk mengembangkan diri. Apabila tenaga kerja Indonesia kalah bersaing dengan tenaga kerja asing, tentu hal tersebut akan mengancam eksistensi perekonomian dan menyebabkan kapitalisme asing yang akan kian melanda. Untuk itu, setiap calon lulusan perguruan tinggi harus menyiapkan diri guna membentuk tenaga yang handal dalam disiplin ilmu yang mereka tempuh. Itikad mahasiswa untuk belajar mutlak diperlukan. Sebagai subjek pembelajar dan sebagai calon pemimpin bangsa, mahasiswa perlu membangun kesadaran diri untuk meningkatkan kemampuan dan kompetensi mereka.

Belakangan ini inkompetensi menjadi masalah yang dihadapi oleh sebagian besar tenaga kerja di Indonesia. Banyak dari tenaga kerja Indonesia yang hanya bekerja untuk alasan bertahan dari nilai-nilai ekonomis. Padahal untuk mewujudkan bangsa yang maju, diperlukan sikap reflektif dari masyarakat agar senantiasa memperbaiki diri dan lingkungannya. Untuk itu, segenap civitas akademika di dalam perguruan tinggi semestinya berupaya membangun kesadaran diri untuk belajar, lebih-lebih oleh para mahasiswa sebagai calon pemimpin bangsa.

Segala aktivitas di dalam organisasi, termasuk akuntabilitas dapat didorong dari semangat belajar para mahasiswa. Dengan membenahi yang belum sempurna dan berkaca pada pengalaman-pengalaman masa lalu, akuntabilitas di dalam organisasi dapat terus berubah menjadi lebih baik seiring waktu. Setiap pengurus organisasi akan digantikan oleh pengurus baru setiap tahunnya. Seringkali transfer ilmu dan pengalaman yang dilakukan diantara pengurus tidak berjalan dengan baik. Akibatnya, pengurus baru seringkali mengulangi kesalahan-kesalahan yang sama yang dibuat oleh pengurus lama. Dengan demikian, penting pula bagi pengurus untuk meningkatkan koordinasi yang ada pada proses regenerasi untuk dapat meningkatkan kualitas pembelajaran itu sendiri.

b. Kekeluargaan sebagai Pemersatu Organisasi

Di dalam organisasi, teori keagenan timbul dari dua pihak yang memiliki tujuan untuk memaksimalkan keuntungannya masing-masing. Tidak jarang pihak-pihak tersebut berusaha memenuhi kepuasan mereka dengan berbagai cara, bahkan dengan bermusuhan dan pertentangan.

Nilai kekeluargaan di HMA tidak menganggap pengurus sebagai agen dari para anggota. Nilai kekeluargaan menyerukan kesetaraan, saling membantu, dan saling menguntungkan. Dengan tumbuhnya nilai kekeluargaan pada diri pengurus dan anggota, mereka dapat menciptakan kenyamanan dan perasaan yang positif diantara satu dengan yang lain.

Dengan memandang tiap-tiap orang yang ada dalam organisasi sebagai suatu keluarga, maka dapat dicapai akuntabilitas yang didasari rasa saling percaya. Tiap-tiap individu adalah pengayom bagi yang lain, oleh karena itu, hubungan saling memuliakan akan terbentuk dalam organisasi.

Implikasi nilai kekeluargaan dalam organisasi akan menghapus sekat antara *superior* dan *inferior*, antara yang memerintah dengan yang diperintah, dan antara yang diawasi dengan yang mengawasi. Sehingga berkembangnya suatu organisasi tidak selalu dilakukan dengan penekanan terhadap otoritas, kekuatan, dan status sosial, namun dengan pelayanan, penjagaan, dan kasih yang murni. Dengan adanya nilai-nilai kekeluargaan ini, loyalitas dan dukungan yang tinggi akan diberikan oleh anggota organisasi yang terbawa oleh rasa nyaman dan emosi-emosi yang positif.

c. Birokrasi sebagai Instrumen Peningkatan Kualitas Organisasi

Selama ini, pertanggungjawaban yang dibuat oleh banyak organisasi, hanya sebagai syarat administratif, bukan dalam rangka mengelola organisasi secara kredibel dan bertanggungjawab. Pertanggungjawaban di organisasi semestinya dilakukan dengan lebih memperhatikan esensi dibalik birokrasi itu sendiri. Organisasi harusnya akan lebih berorientasi output serta meningkatkan kualitas manajemen mereka.

Terlepas dari mekanisme birokrasi yang ada, kini ada desakan dari masyarakat yang menuntut organisasi nonprofit agar bersikap lebih terbuka, jujur, dan demokratis dalam menjalankan kegiatan dan mengelola organisasinya. Suatu hal yang wajar ketika suatu organisasi menuntut kontribusi dari anggotanya secara aktif, demokratis, dan bersatu, ada tuntutan yang sama terhadap moralitas dari kalangan organisasi itu juga.

5. Simpulan

Penelitian ini menguraikan praktisi dan mekanisme akuntabilitas dalam sebuah organisasi nonprofit yang bergerak dalam bidang pengembangan kepemudaan di lingkungan universitas, yakni Himpunan Mahasiswa Akuntansi (HMA) UNAIR. Temuan-temuan

penelitian yang diharapkan dapat menjawab pertanyaan penelitian. Berdasarkan pembahasan atas partisipasi peneliti di HMA UNAIR, terdapat hal-hal yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Akuntabilitas HMA dalam bentuk laporan dan pertanggungjawaban dibuat dalam rangka memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh lembaga yang berada di atas HMA, seperti fakultas dan departemen akuntansi.
2. Bagi pengurus dan anggota HMA, wujud nyata dari perilaku dan tindakan adalah cermin dari akuntabilitas itu sendiri. Mereka beranggapan bahwa segala bentuk aktivitas dan pemanfaatan dana di HMA dilakukan dengan itikad baik.
3. Akuntabilitas HMA didorong oleh semangat mahasiswa sebagai kaum pembelajar untuk senantiasa mengarah ke perbaikan dan penyempurnaan.
4. Antusiasme atas alat dan proses akuntabilitas, seperti laporan keuangan, partisipasi, regulasi, dan audit sosial di HMA secara keseluruhan masih perlu ditingkatkan. Banyak dari stakeholders HMA yang kurang memanfaatkan alat dan proses tersebut sebagai mekanisme evaluasi, pengawasan, dan instrumen perbaikan.

Daftar Rujukan

- Anton. (2010). Menuju Teori *Stewardship* Manajemen. *Majalah Ilmiah Informatika*, 1(2), 61-80.
- Bovens, M. (2007). Analysing and Assessing Accountability: A Conceptual Framework. *European Law Journal*, 13(4), 447-468.
- Budi, M. W. K. (2013). Akuntabilitas Kepala Daerah di Persimpangan Jalan (Dari Pilkada Langsung Menuju Pilkada oleh DPRD).
- Donaldson, L.&Davis, J. H.(1991). Stewardship Theory or Agency Theory: CEO Governance and Shareholder Returns. *Australian Journal of Management*, 16(1), 49-64.
- Ebrahim, A. (2003). Accountability in Practice: Mechanisms for NGOs. *World Development* 31(5), 813-829.
- Fahrudin, W. (2003). Akuntabilitas dan Transparansi LSM dalam Proses Transformasi Sosial Menuju Masyarakat Demokratis di Indonesia. *CIVIC*, 1, 37-48.
- Gray, R., Bebbington, J.& Collison. D.(2006). NGOs, Civil Society and Accountability: Making the People Accountable to Capital. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 19(3), 319-348.

- Greenberg, M. T., Weissberg, R. P., O'Brien, M. U., Zins, J. E., Fredericks, L., Resnik, H., & Elias, M. J. (2003). Enhancing School-based Prevention and Youth Development through Coordinated Social, Emotional, and Academic Learning. *American Psychologist*, 58(67), 466-474.
- Himpunan Mahasiswa Akuntansi. (2008). *Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga*. Himpunan Mahasiswa Akuntansi Universitas Airlangga. Surabaya.
- Huse, M., J. Gabriellson, & A. Minichilli. (2005). Knowledge and Accountability: Outside's Directors' Contribution in the Corporate Value Chain. *Research in Management Consulting Series*.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2011. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 45 tentang Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba*. Ikatan Akuntan Indonesia. Jakarta.
- Jordan, Lisa. (2005). Mechanisms for NGO Accountability. *GPPi Research Paper Series*3.
- Keating, Elizabeth K., and Peter Frumkin. (2003). Re-engineering Nonprofit Financial Accountability: Toward a More Reliable Foundation for Regulation. *Public Administration Review*63(1), 3-15.
- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (1998). *Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 155/U/1998 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Jakarta.
- Republik Indonesia. (1999). *Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme*. Lembaran Negara RI Tahun 1999, Nomor 75. Sekretaris Negara. Jakarta.
- _____. (2001). *Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan*. Lembaran Negara RI Tahun 2001, Nomor 112. Sekretaris Negara. Jakarta.
- Rochman, M. (2012). Kultur Berorganisasi LSM Tertinggal. *Jurnal Akuntabilitas Organisasi Masyarakat Sipil*, 1, 71-77.
- Rooney, G.(2012). Lembaga Donor Perlu Serius Mendukung Upaya LSM Meningkatkan Akuntabilitasnya. *Jurnal Akuntabilitas Organisasi Masyarakat Sipil*, 1, 78-81.
- Silvia, J., & Ansar, M.(2011). Akuntabilitas dalam Perspektif Gereja Protestan (Studi Fenomenologis pada Gereja Protestan Indonesia Donggala Jemaat Manunggal Palu). Makalah disajikan dalam Simposium Nasional Akuntansi (SNA) 14. Banda Aceh.
- Sujatmiko. (2006). Akuntabilitas Pelayanan Publik. *Jurnal Universitas Tidar Magelang* 26(2), 442-448.
- Van Bussel, G.-J., & Henseler, H. (2013). *Digital Archiving and e-Discovery: Delivering Evidence in an Age of Overload*. Paper presented at the proceedings of the 4th International Conference on Information Systems Management and Evaluation (Ho Chi Minh City).
- Van Puyvelde, S., Caers, R., Du Bois, C., & Jegers, M. (2012). The Governance of Nonprofit Organizations Integrating Agency Theory with Stakeholder and Stewardship Theories. *Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly*. 41(3), 431-451.
- Yahya, M. N., Ahmad, N. N. N., & Fatima, A. H. (2005). Budgetary Participation and Performance: Some Malaysian Evidence. *International Journal of Public Sector Management*, 21(6), 658-673.
- Yin, Robert. K. (2009). *Case Study Research*. California: Sage Publications.
- Zainon, S., Atan, R., Wah, Y. B., & Nam, R. Y. T. (2011). Institutional Donors' Expectation of Information from the Non-Profit Organizations (NPOs) Reporting: A Pilot Survey. *International NGO Journal*, 6, 170-180.